

**INFORMASI KEBUTUHAN DASAR DALAM LIPUTAN MEDIA  
(Studi Konten Analisis Terhadap Surat kabar Rakyat Merdeka  
Edisi Agustus 2016)**

***INFORMATION BASIC NEEDS OF MEDIA COVERAGE  
(Study Content Analysis of newspaper Rakyat Merdeka  
August 2016 edition)***

**Ari Cahyo Nugroho**

Peneliti Bidang Studi Komunikasi dan Media pada Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Jakarta, Jln. Pegangsaan Timur No. 19 B Jakarta Pusat, . Provinsi DKI Jakarta, Indonesia  
Telp. 31922337, aricahyonugroho@gmail.com

(Naskah diterima 3-5-2016, revisi pasca editing redaksi 16-8-2016, diperiksa PR .. 16-8-2016, disetujui terbit oleh PR 19-8-2016)

**ABSTRACT**

*The background of this paper is surveillance function of media to the problem of basic needs information that refers to one goal in nawacita. This study seeks to answer the question Reporting Information Basic Needs In Rakyat Merdeka newspaper and was preaching reflect government support for the program. Content analysis method used in collecting data to the preaching of August 2015 edition of Rakyat Merdeka. Rotated sampling is used in this research. a coding sheet (0.80) is used and reliabelitas calculated by the formula Holsti. The results show that media reporting reflects the low effort salience behavior issues by media in their efforts to carry out the functions surveillance media. So is the lack of findings are still related to news information rigit previous basic needs. This is an indication that the media has not attempted to act in order to realize Prominence surveillance issue in the implementation of its functions. However, in its presentation, the media seem to make efforts to be valence in pemediasian. a major factor why the media do its function surveilencethat juridically media is supported in the freedom of expression and democracy in the dominant culture in the community polysemi in response to a variety of information.*

**Keywords : basic need information, media coverage; Content Analysis; Newspaper**

**ABSTRAK**

Berlatarbelakangkan melihat pelaksanaan fungsi *surveillance* media terhadap persoalan informasi kebutuhan dasar yang mengacu pada salah satu cita dalam nawacita, penelitian ini berupaya menjawab permasalahan Pemberitaan Informasi Kebutuhan Dasar Dalam Surat kabar Rakyat Merdeka dan Apakah Pemberitaan dimaksud mencerminkan dukungan terhadap program pemerintah. Melalui metode *content analysis* dalam pengumpulan datanya terhadap pemberitaan Rakyat Merdeka edisi Agustus 2015 yang diambil secara *rotated sampling*, maka dengan menggunakan *coding sheet* (senilai 0,80) yang reliabelitasnya dihitung berbasiskan rumus Holsti, hasilnya menunjukkan bahwa pemberitaan media merefleksikan masih rendahnya upaya perilaku *salience issue* yang dilakukan media dalam upaya mereka melakukan fungsi *surveillance*.media. Begitu juga dengan temuan masih minimnya secara rigit terkait pemberitaan informasi kebutuhan dasar sebelumnya. Hal ini juga menjadi indikasi bahwa media masih belum berupaya bertindak agar terwujudnya *prominence issue* dalam pelaksanaan fungsi *surveillance*-nya. Namun demikian, dalam penyajiannya, media tampak melakukan upaya-upaya bersifat *valence* dalam pemediasianna itu. Dua kemungkinan besar yang menjadi faktor utama mengapa media melakukan fungsi *surveillance*-nya itu seperti tadi. Pertama karena media secara yuridis memang didukung dalam kebebasan bersekspresi dan kedua dalam iklim demokrasi dominannya budaya polysemi di kalangan masyarakat (media) dalam peresponan terhadap berbagai informasi.

**Kata-kata kunci : Informasi Kebutuhan Dasar; Liputan Media; Konten Analisis; Surat kabar.**

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Media massa memiliki sejumlah fungsi dan salah satu diantaranya, sebagaimana dikatakan Wright (1986) adalah fungsi *surveillance*, atau fungsi pengawasan. Fungsi ini sendiri berkaitan dengan fungsi pengawasan media terhadap dinamika yang terjadi di lingkungannya menyangkut kegidupan sosial, ekonomi, politik dan sejenisnya yang dianggap pihak media penting disampaikan kepada khalayak pembaca.

Terkait dengan implikasi dari fungsi pengawasan sebelumnya, secara teoritis diketahui bahwa pelaksanaannya itu disebutkan tergantung pada sistem politik yang berlaku di mana suatu media itu beroperasi. Dengan demikian dalam realitanya, praktek penerapan fungsi *surveillance* itu berbeda-beda oleh setiap media dan itu tergantung pada sistem politik yang berlaku di negaranya.

Di Indonesia sendiri, sistem politik yang dianut yaitu sistem demokrasi yang seluas-luasnya. Sistem ini dianut sejak eksisnya era Pemerintahan Reformasi pada Thn 1998 yang menumbangkan rejim Orde Baru hingga saat ini.

Pada Era yang kini dipimpin oleh Presiden Jokowi-Jusuf Kalla ini, sistem politik “demokrasi yang seluas-luasnya” tadi sendiri, wujud model pemerintahannya sendiri mereka tuangkan ke dalam bentuk Visi dan Misi yang secara substantif memuat Nawacita.

Nawacita(<http://nasional.kompas.com>) merupakan istilah umum yang diserap dari bahasa Sanskerta, nawa (sembilan) dan cita (harapan, agenda, keinginan), istilah ini merujuk kepada visi-misi yang dipakai oleh pasangan calon presiden/calon wakil presiden Joko Widodo/Jusuf Kalla. Dalam visi-misi tersebut dipaparkan sembilan agenda pokok yakni memperkuat jati diri sebagai negara maritim, membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, memperkuat daerah-daerah dan desa, melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, mewujudkan kemandirian ekonomi, melakukan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional, serta memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Kembali pada praktek fungsi *surveillance* oleh media sebelumnya, maka dalam kaitan sistem politik yang berlaku di Indonesia, itu berarti media di Indonesia saat ini dalam operasionalnya di bawah naungan sistem politik demokrasi yang seluas-luasnya tadi. Praktek operasional fungsi *surveillance* media massa sendiri, di tengah iklim politik dimaksud ditunjang oleh UU No 40 Tentang Pers. Suatu undang-undang yang secara substantif benar-benar memberikan kebebasan dalam beroperasi.

Paparan menyangkut level normatif sebelumnya kiranya mengindikasikan adanya kekurangsinkronan antara garis dasar kepemimpinan nasional dan landasan politis/juridis bagi praktik pers. Ketidaksinkronan ini pada gilirannya, tentunya akan bisa berakibat negatif, misalnya praktik fungsi aplikasi *surveillance* media itu menjadi tidak maksimal.

Dalam kaitan asumsi di atas, penelitian ini sendiri akan berupaya menelaahnya lebih jauh. Telaahnya sendiri secara umum diarahkan pada upaya melihat tingkat respek media massa terhadap program pemerintah sebagaimana tertuang dalam nawacita, khususnya pada cita “memperkuat jati diri sebagai negara maritim” dan cita “mewujudkan kemandirian ekonomi”. Sementara secara khusus, studi ini difokuskan pada wujud aplikasi media massa dalam melaksanakan fungsi *surveillance*-nya menyangkut ke dua cita tadi. Untuk kepentingan dimaksud, maka secara purposive penelitian ini menetapkan Rakyat Merdeka terbitan Agustus 2015 sebagai kasus.

Penentuan ini dilakukan karena Rakyat Merdeka dengan slogan *The Politict News Leader* itu sifatnya cenderung populis yang nota bene akan jauh dari campur tangan pemerintah. Asumsi ini diperkuat lagi dengan sistem kerja pers yang secara juridis kebebasannya di dukung oleh UU. No. 40 Tentang Pers. Berdasarkan argumentasi dimaksud, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan menjadi : 1) Bagaimanakah Pemberitaan Informasi Kebutuhan Dasar Dalam Surat kabar Rakyat Merdeka ? 2) Apakah Pemberitaan Informasi Kebutuhan Dasar dimaksud mencerminkan dukungan terhadap program pemerintah ?

Dengan permasalahan tersebut, penelitian ini secara umum ingin mendapatkan gambaran mengenai pemberitaan Informasi Kebutuhan Dasar Dalam Surat kabar Rakyat Merdeka dan gambaran tentang dukungan media terhadap pemerintah. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pers dalam melaksanakan fungsi *surveillance*-nya dalam iklim pers yang bebas secara juridis di tengah sistem pemerintahan yang menganut sistem politik demokrasi yang seluas-luasnya. Secara akademik, hasil penelitian ini secara signifikan diharapkan dapat melengkapi hasil-hasil studi pers yang sudah ada sebelumnya. Secara praktis diharapkan dapat menjadi pelengkap pengetahuan baru bagi pembaca tentang praktik pers dalam kaitannya dengan kepentingan pemerintah.

## PEMBAHASAN

### Konsep-Konsep Teoritik Informasi Kebutuhan Dasar

#### -Informasi

Informasi adalah data yang diolah hingga memiliki suatu nilai –pengolahan ini pastinya dilakukan oleh pengguna informasi tersebut-, dan ketika nilai tersebut dirubah melalui proses pemikiran yang disesuaikan dengan orientasi subjek yang memiliki informasi maka informasi dapat menjadi suatu pengetahuan bagi si pelaku.

Manusia pada dasarnya melakukan aktivitasnya dalam kehidupan berdasarkan pengetahuan dan informasi yang dimiliki. Tanpa informasi dapat kita bayangkan apa yang terjadi pada manusia, mereka akan berada dalam suatu kondisi yang tidak menentu. Terkait dengan ini maka menurut beberapa penelitian dan tulisan ilmiah (Schement, 2002; Heath & Jennings, 2000; Kincaid & Schramm, 1980; Watzwalik, Beavin, & Jackson, 1967; Shannon & Weaver, 1949 & 1964) disimpulkan bahwa satu alasan utama manusia berkomunikasi dan saling bertukar informasi adalah karena ketidakpastian yang timbul pada individu baik yang timbul karena tekanan dari dalam ataupun dari luar dirinya termasuk lingkungannya.

Secara istilah, kata informasi sendiri berasal dari bahasa Perancis kuno yakni *Informacion* (1387) mengambil istilah dari bahasa Latin yakni *Informationem* yang artinya “konsep, ide atau garis besar”. Informasi juga merupakan kata benda dari kata *Informare* yang artinya aktifitas, aktifitas disini dalam arti pengetahuan yang dimomunikasikan. (<http://www.seputarpengetahuan.com/2015>).

Dari kalangan ahli sendiri, informasi diantaranya diartikan sebagai data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga mampu meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut (Kadir, McFadden dkk). Sementara George R. Terry menjelaskan bahwa informasi itu sebagai data yang terpenting untuk memberikan pengetahuan yang bermanfaat. Kemudian Meliono mengatakan bahwa informasi merupakan suatu data yang sudah diproses untuk tujuan tertentu, yaitu agar menghasilkan suatu keputusan.

Dari beberapa pengertian informasi menurut para ahli tadi dapat diambil pengertian bahwa informasi ialah sekumpulan fakta-fakta atau peristiwa yang telah diolah menjadi sebuah bentuk data, dimana data tersebut dapat digunakan oleh siapa saja untuk mengambil sebuah keputusan.

Kebutuhan adalah suatu keadaan yang ditandai oleh perasaan kekurangan dan ingin diperoleh sesuatu yang akan diwujudkan melalui suatu usaha atau tindakan (Murray dalam Bherm, 1996).

Kebutuhan dasar manusia adalah hal-hal seperti makanan, air, keamanan dan cinta yang merupakan hal yang penting untuk bertahan hidup dan kesehatan.

King (1987, dalam Potter, 2005) mengatakan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar manusia berfokus pada tiga sistem yakni, sistem personal, interpersonal, dan sistem sosial.

Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis, yang tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow dalam teori Hirarki, kebutuhan menyatakan bahwa setiap manusia memiliki lima kebutuhan dasar yaitu kebutuhan fisiologis, keamanan, cinta, harga diri, dan aktualisasi diri (Potter dan Patricia, 1997). Beberapa kebutuhan manusia tertentu lebih mendasar daripada kebutuhan lainnya. Oleh karena itu beberapa kebutuhan harus dipenuhi sebelum kebutuhan lainnya. Kebutuhan dasar manusia seperti makan, air, keamanan dan cinta merupakan hal yang penting bagi manusia. Dalam mengaplikasikan kebutuhan dasar manusia tersebut dapat digunakan untuk memahami hubungan antara kebutuhan dasar manusia dalam mengaplikasikan ilmu keperawatan di dunia kesehatan. Besarnya kebutuhan dasar yang terpenuhi menentukan tingkat kesehatan dan posisi pada rentang sehat-sakit.

## Fungsi Media

Mempelajari mengapa media memainkan peran tertentu dalam proses komunikasi massa, merujuk pada teori-teori fungsi media massa (lihat : Littlejohn (1996); Wright (1988); dan Infante, Rancer dan Womack (1990) , maka diketahui bahwa isu seperti informasi kebutuhan dasar itu dapat dikatakan hanya sebagai salah satu bentuk saja dari beragam upaya media dalam memainkan perannya, yakni peran yang mengacu pada skenario fungsi *surveillance*, *correlation* or *mobilization*.

Fungsi *surveillance* atau pengawasan menunjukkan aktifitas pengumpulan dan distribusi informasi mengenai kejadian-kejadian yang berlangsung di lingkungan, baik di luar maupun di dalam suatu masyarakat tertentu (Wright, 1988). Pengawasan adalah fungsi komunikasi massa berupa penyampaian informasi dan berita (Littlejohn, 1996). Jadi, peng-agendaan media tentang isu *informasi kebutuhan* dasar melalui pemberitaannya di surat kabar, adalah merupakan salah satu perwujudan dari sejumlah fungsinya tadi, dalam hal ini terkait dengan *fungsi surveillance*.

Fungsi *correlation* mencakup interpretasi informasi mengenai lingkungan dan pemakaiannya untuk berperilaku dalam reaksinya terhadap suatu peristiwa atau kejadian (Wright, 1988). Fungsi ini berkaitan dengan bagaimana media massa memilih, menginterpretasikan dan mengkritik peristiwa yang terjadi di lingkungannya. Perwujudan fungsi ini umumnya tercermin melalui tajuk rencana atau editorial (Littlejohn, 1996). Sementara fungsi *mobilization* yaitu berhubungan dengan kemampuan suatu media dalam menggerakkan khalayaknya (memobilisir massa) untuk bersikap atau bertindak tertentu sesuai dengan kandungan dalam isi pesan media yang disampaikan oleh organisasi media (Infante, Rancer dan Womack, 1990).

Di sisi lain, dalam kaitan pemeranan dua fungsi tadi, ragam media secara relative juga merefleksikan kualifikasi yang tidak sama dalam memainkan peran kedua fungsi itu. Adakalanya, sebuah isu yang sama mendapat perlakuan sangat berbeda dari beragam media. Satu media menjadikannya sebagai *banner head line* dan bahkan menjadi sumber inspirasi pembuatan editorialnya. Sementara di sebagian besar media lainnya, sering justru terjadi hanya sebatas berita *spot* saja.

Refleksi ragam kualifikasi pemeranan dua fungsi tadi, berdasarkan tinjauan teoritis diketahui bahwa fenomena itu secara teoritis epistemologis bisa dijelaskan secara dikotomistis. Pertama menurut kutub Frankfurt School yang negativisme menurut Mc Quail dan kedua menurut versi Chichago School yang positivistic (Mc Quail, 1991). Pendekatan ekonomi politik seperti yang dikemukakan Oliver Boyd-Barrett (1995: 186-192), kiranya menjadi salah satu pendekatan dalam kutub Frankfurt School yang bisa menjelaskan kemunculan fenomena ragam kualifikasi pemeranan dua fungsi tadi. Sementara dalam versi Chichago School yang positivistic, maka fenomena sebagaimana dimaksud diantaranya dijelaskan oleh teori agenda setting.

Salah satu teori yang secara ilmiah memfasilitasi bagaimana melakukan studi fenomena isi media melalui teknik pengumpulan data *content analisis* adalah teori Agenda Setting dari Mc Comb dan Donald Shaw (McCombs, M.E., & Shaw, D.L. (1972). *Agenda setting describes a very powerful influence of the media – the ability to tell us what issues are important*.

*As far back as 1922, the newspaper columnist Walter Lippman was concerned that the media had the power to present images to the public, mengatakan bahwa secara spesifik agenda setting is a theory about the transfer of salience of the elements in the mass media's pictures of the world to the elements in the pictures in our heads. The core theoretical idea is that elements prominent in the media picture become prominent in the audience's picture. In the words of the agenda setting metaphor, this is a causal assertion that the priorities of the media agenda influence the priorities of the public agenda.* ([http://www.Unc.Edu/courses/2000fall/jo.mc.245-001/agenda\\_setting.html](http://www.Unc.Edu/courses/2000fall/jo.mc.245-001/agenda_setting.html)).

Apa yang dikatakan Lipman sebelumnya tentang “*the transfer of salience of* “, dalam kenyataan riset agenda setting, adakalanya tidak selalu harus dilakukan hingga ke tingkat pengukuran kesesuaian antara “*the mass media's pictures of the world*” dengan “*the pictures in our heads*”. Asumsi ini paling tidak dikuatkan oleh asumsi yang terdapat dalam teori agenda setting, di mana disebutkan “*Agenda-setting is the creation of public awareness and concern of salient issues by the news media. Dua asumsi dasar yang digarisbawahi pada kebanyakan penelitian agenda-setting , yakni : (1) the press and the media do not reflect reality; they filter and shape it; (2) media concentration on a few issues and subjects leads the public to perceive those issues as more important than other issues. .... In addition, different media have different agenda-setting potential*”. Argumentasi penguat lainnya yaitu

*Agenda-setting as a concept is not limited to the correspondence between salience of topics for the media and the audience". .(http//www. Unc. Edu/courses/2000fall/jo mc. 245-001/agenda\_setting.html).*

Dalam hubungan encoding media terkait dengan teori agenda setting tadi, maka sebagaimana dikatakan Mc Comb dan Donald Shaw (dalam Rusadi, 1996 : 49), pada tahap pertama para pelaksana media itu melakukan proses seleksi terhadap isu-isu yang ada di lingkungannya, kemudian menyajikan isu tersebut dengan melakukan penajaman atau penonjolan pada hal-hal tertentu, dan selanjutnya khalayak menangkap isu-isu tersebut melalui proses kognitif mereka.

Mempelajari *dalam tataran deskriptif* tentang praktisi media melalui perilaku tertentu dalam proses *encoding* (melakukan seleksi isu, seleksi penonjolan, seleksi interpretasi dan lain sejenisnya) guna memerankan fungsi *surveillance, correlation dan mobilization*-nya, maka dengan melihat asumsi teori agenda setting tadi, kiranya itu menjadi justifikasi teoritis bahwa apa yang hendak dijawab dalam penelitian ini sebagai termasuk bagian kecil dari upaya mempelajari media dalam perspektif teori agenda setting. Agenda setting dimaksud, yakni pada tahapan studi agenda media yang terkait dengan *salience issue*. pada tataran media agenda saja.

**Definisi Kategori :**

1) Substansi konten

a. Jenis Informasi Kebutuhan Dasar

No.	Jenis Informasi	Subinformasi
	informasi sandang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas produk sandang</li> <li>• Produk sandang dalam negeri</li> <li>• Etika berbusana</li> <li>• Kebijakan pemerintah terkait sandang</li> <li>• Lainnya : .....</li> </ul>
	informasi pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harga sembako</li> <li>• Ketersediaan bahan pokok</li> <li>• Pasar tempat memperoleh sembako</li> <li>• Standar gizi pangan</li> <li>• Cara dan kebiasaan konsumsi pangan</li> <li>• Kualitas yang aman dan baik bagi pangan</li> <li>• Kebijakan pemerintah terkait pangan</li> <li>• Lainnya : .....</li> </ul>
	informasi papan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harga bahan bangunan</li> <li>• Harga bahan property</li> <li>• Standar rumah sehat dan layak huni</li> <li>• Fasilitas pembiayaan perumahan</li> <li>• Bantuan pemerintah untuk perumahan rakyat</li> <li>• Kebijakan pemerintah mengenai perumahan</li> <li>• Lainnya : .....</li> </ul>
	informasi kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pola perilaku hidup sehat</li> <li>• Obat dan pengobatan tradisional</li> <li>• Kebijakan pemerintah mengenai kesehatan</li> <li>• Lainnya : .....</li> </ul>
	informasi Sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana sanitasi dasar (Kakus, septic tank, MCK)</li> <li>• Pengelolaan air minum dan makanan</li> <li>• Ketersediaan fasilitas cuci tangan di lokasi-lokasi pelayanan umum</li> <li>• Pengelolaan limbah rumah tangga</li> <li>• Pengelolaan sampah rumah tangga</li> <li>• Kebijakan pemerintah mengenai sanitasi</li> <li>• Lainnya : .....</li> </ul>

	informasi Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya pendidikan</li> <li>• Informasi Beasiswa</li> <li>• Kualitas pendidikan / akreditasi program dan lembaga pendidikan</li> <li>• Kebiasaan pendidikan pengajaran</li> <li>• Kebijakan pemerintah mengenai pendidikan</li> <li>• Lainnya : .....</li> </ul>
--	----------------------	---

b. Jenis Informasi Kebutuhan Dasar Bidang Kemaritiman

INFORMASI KEMARITIMAN		
	Produksi Kelautan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis produk kelautan</li> <li>• Proses pengolahan sumber daya laut</li> <li>• Standar kualitas produk kelautan</li> <li>• Ketersediaan bahan bakar minyak (BBM)</li> <li>• Harga BBM</li> <li>• Lainnya: .....</li> </ul>
	Konsumsi Produk Kelautan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis-jenis produk kelautan yang bisa dikonsumsi</li> <li>• Pola konsumsi produk kelautan</li> <li>• Lainnya : .....</li> </ul>
	ekonomi Kelautan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemasaran produk kelautan</li> <li>• Permintaan produk kelautan</li> <li>• Lainnya : .....</li> </ul>
	Informasi Pertahanan dan Keamanan Laut	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Batas wilayah laut</li> <li>• Nomor kontak polisi laut</li> <li>• Cuaca dan iklim</li> <li>• Kedalaman laut</li> <li>• Lainnya : .....</li> </ul>
	Informasi Aktivitas Perusakan Lingkungan Laut	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis perbuatan merusak lingkungan laut</li> <li>• Cara pencegahan perusakan lingkungan laut</li> <li>• Organisasi-organisasi pecinta lingkungan laut</li> <li>• Lainnya : .....</li> </ul>
	Informasi Peran Serta Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organisasi-organisasi nelayan</li> <li>• Bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam bidang kemaritiman</li> <li>• Lainnya : .....</li> </ul>
	Informasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Kemaritiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan tentang jalur penangkapan ikan</li> <li>• Bantuan pemerintah untuk masyarakat di bidang kemaritiman</li> <li>• Lainnya : .....</li> </ul>
	Informasi Kebudayaan Kelautan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potensi-potensi pariwisata kelautan</li> <li>• Nilai-nilai budaya bahari</li> <li>• Lainnya : .....</li> </ul>

2) Teknikal Sajian konten adalah pemberitaan surat kabar terkait dengan masalah Letak Pemberitaannya, Sumber Utama Berita ; Sumber Berita Menurut Nama Kementerian ; Pejabat Eksekutif yang Menjadi Subjek Berita ; Pejabat Eksekutif yang Menjadi Sumber Utama Berita; Opini dan arah pendapat nara sumber.

**Metode Penelitian**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode Content Analysis tradisional yang berparadigma positivistic. Analisis isi kuantitatif pada umumnya hanya dapat digunakan untuk membedah muatan teks Komunikasi yang bersifat nyata (*manifest*). Bahwa analisis isi hanya dapat

melihat apa yang terlihat, tidak terlepas dari metode yang dipakai yaitu kuantitatif yang mementingkan objektivitas, validitas dan reliabilitas. Dalam analisis isi kuantitatif tidak boleh ada penafsiran dari peneliti. Peneliti hanya boleh membaca apa yang disajikan dalam teks, dalam hal ini yang terlihat dalam teks. Siapa sumber berita, ukuran berita, letak atau posisi berita adalah contoh dari elemen-elemen yang terlihat nyata ada dalam teks media. Analisis isi kuantitatif hanya dapat mempertimbangkan apa yang dikatakan (*what*), tetapi tidak dapat menyelidiki bagaimana ia dikatakan (*how*). Dalam kenyataannya, yang penting bukan apa yang dikatakan oleh media, tetapi bagaimana dan dengan cara apa pesan disampaikan.

Berelson dalam Holsti (1969), menyebutkan bahwa teknik penelitian yang menggunakan analisis isi bisa menggambarkan secara objektif, sistematis dan kuantitatif tentang isi komunikasi yang tersurat. Objektivitas dicapai dengan menggunakan kategori analisis yang diklasifikasi secara tepat sehingga orang lain yang menggunakannya untuk menganalisis isi yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Sistematis diartikan bahwa prosedur tertentu diterapkan dengan cara yang sama pada semua isi yang dianalisis. Sementara kuantitatif mengandung pengertian penelitian ini dicerminkan dalam data kuantitatif atau melalui perhitungan angka.

Koran yang dijadikan kajian adalah koran Rakyat Merdeka. Sampling dilakukan dengan sistem *rotated sampling* pada edisi Agustus 2015. Analisis dilakukan dengan teknik analisis deskriptif. *Recording unit* penelitian ini adalah : 1) Substansi konten ; 2) Teknikal Sajian konten.

Terkait 1) substansi konten, meliputi isi surat kabar yang mengandung muatan : Informasi Kebutuhan Dasar dan Kebutuhan Dasar khusus terkait Bidang Kemaritiman. Sementara terkait dengan 2) Teknikal Sajian konten, ini meliputi . Penyajian Berita itu sendiri, ini misalnya terkait dengan layout pemberitaan atau soal aktor atau sumber yang dikanalisis dalam pemberitaan surat kabar, serta arah pendapatnya dalam pemberitaan.

Untuk menjawab kepentingan penelitian ini, maka sebelum pengumpulan data, dilakukan uji kesepakatan atas *coding sheet* yang dibangun. Uji kesepakatan dilakukan dengan berbasiskan rumus Holsti. Penerapan *coding sheet* dilakukan setelah para *coder* mencapai nilai sebesar 0,80.

**Penyajian dan Analisis Hasil Penelitian**

1) Pemberitaan Informasi Kebutuhan Dasar Dalam Surat kabar Rakyat Merdeka

1) Substansi konten

Terkait dengan substansi konten dimaksud (lihat tabel 1), tampak bahwa media ada 24 kali menyampaikan konten yang secara substantif berkaitan dengan informasi meyangkut kebutuhan dasar. Di antara informasi dimaksud, maka tampak bahwa informasi meyangkut pangan itu ternyata merupakan yang paling banyak dimuat media, frekuensinya mencapai 9 (37.5%). Informasi lainnya yang cukup berarti, secara berimbang pemunculannya mencapai 5 kali atau 20,8%. Dua informasi dimaksud yaitu Informasi\_Pendidikan dan Produksi\_Kelautan. Sementara jenis informasi dalam kategori yang sama jumlahnya relatif kecil, yaitu dengan proporsi antara 0 – 12,5%. Jenis-jenis informasi dimaksud yaitu : pangan; sanitasi; kesehatan dan papan.

Semenetara mengenai informasi bidang kelautan, meskipun masih tampak dalam peliputan media akan tetapi sifatnya masih terlalu umum. Dengan begitu informasi dimaksud cenderung tidak dapat dispesifikan persoalannya, apakah terkait dengan masalah produksi kelautan; konsumsi produksi kelautan; terkait ekonomi kelautan; meyangkut masalah hankam kelautan; meyangkut masalah kerusakan kelautan; peran serta masyarakat atau meyangkut masalah kebijakan pemerintah terkait kelautan.

Tabel 1  
 Pemberitaan Menurut Konten Informasi  
 Kebutuhan Dasar dan Kemaritiman

		Frequency	Percent
Valid	Informasi_Pangan	9	37.5
	Informasi_Papan	3	12.5

	Informasi_Kesehatan	1	4.2
	Informasi_Sanitasi	1	4.2
	Informasi_Pendidikan	5	20.8
	Produksi_Kelautan	5	20.8
	Total	24	100.0

Sumber: hasil kajian media BPPKI DKI Jakarta 2015

## 2) Teknikal Sajian konten

Terkait dengan pemediastansi substansi konten menyangkut informasi kebutuhan dasar sebelumnya, maka temuan menunjukkan bahwa beragam informasi itu ada yang disajikan sebagai berita *head line*, ada yang hanya dui halaman depan meski bukan sebagai head line. Selain itu ada juga yang disampaikan pada halaman tengah, halaman belakang dalam dan halaman belakang.

Berdasarkan temuan memperlihatkan bahwa informasi meyanglut kebutuhan dasar itu cenderung lebih banyak yang disajikan di halaman belakang bagian dalam. Proporsi berita yang demikian, ada 15 kali pemuatannya (62,5%) dan ini menjadi proporsi yang paling banyak. Sementara berita-berita yang ditempatkan pada halaman-halaman lainnya proporsinya relatif kecil yakni berkisar 4,2 % hingga 12,5%. (lihat tabel 2)

Tabel 2  
 Pemberitaan Menurut Tata Letak Pemberitaannya

Halaman Penempatan	Frequency	Percent
Halaman_Utama_(Headlines)	3	12.5
Halaman_Depan_Dalam	2	8.3
Halaman_Tengah	3	12.5
Halaman_Belakang_Dalam	15	62.5
Halaman_Belakang	1	4.2
Total	24	100.0

Sumber: hasil kajian media BPPKI DKI Jakarta 2015

Terungkap pula bahwa berita-berita yang disajikan itu sumber-sumber beritanya adalah semua berasal dari pihak eksekutif. Pihak-pihak eksekutif dimaksud, secara rinci diketahui bahwa mereka itu berasal dari tujuh pihak. Namun demikian, mereka lebih banyak berasal dari pihak Pejabat Eselon I dan menteri atau pimpinan tertinggi. (lihat tabel 4).

Tabel 4  
 Pemberitaan Menurut  
 Pejabat Eksekutif Yang Menjadi Sumber Utama Berita

Pejabat Eksekutif	f	%
Presiden	2	8,3
Wakil presiden	0	0,0
Menteri atau pimpinan tertinggi	6	25,0
Pejabat Eselon I	8	33,3

Pejabat Eselon II	2	8,3
Humas pemerintah	0	0,0
lainnya	6	25,0

Sumber: hasil kajian analisis media BPPKI DKI Jakarta 2015

Kemudian terkait dengan asal berita tadi menurut asal kementeriannya, ditemukan bahwa berita-berita tadi itu banyak yang berasal dari Kementerian Pertanian (6) dan Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah (5). Sementara yang berasal dari kementerian-kementerian lainnya, dapat dikatakan jumlahnya hampir tidak ada. (lihat tabel 5). Sementara terkait dengan pejabat eksekutif yang dijadikan subjek berita dalam pemberitaan itu, penelitian ini menemukan bahwa Menteri atau pimpinan tertinggi merupakan subjek paling banyak dalam pemberitaan itu. Proporsinya mencapai 12 kali (50%) dalam pemediasian pihak media. Disusul Presiden, jumlahnya mencapai 10 kali (41,7%) penempatan sebagai aktor dalam pemberitaan media. Sementara pejabat eksekutif lainnya jumlahnya relatif kecil, yaitu antara 0 hingga 2 kali saja pemunculannya dalam pemberitaan.

Tabel 5  
Pemberitaan Menurut Asal Kementerian  
Sumber Berita

	f	%
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	0	0,0
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1	4,2
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	1	4,2
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	0	0,0
Kementerian Sekretariat Negara	0	0,0
Kementerian Dalam Negeri	0	0,0
Kementerian Luar Negeri	0	0,0
Kementerian Pertahanan	0	0,0
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	0	0,0
Kementerian Keuangan	0	0,0
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1	4,2
Kementerian Perindustrian	1	4,2
Kementerian Perdagangan	1	4,2
Kementerian Pertanian	6	25,0
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0	0,0
Kementerian Perhubungan	1	4,2
Kementerian Kelautan dan Perikanan	2	8,3
Kementerian Ketenagakerjaan	1	4,2
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	0	0,0
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2	8,3
Kementerian Kesehatan	1	4,2
Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah	5	20,8

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	0	0,0
Kementerian Sosial	0	0,0
Kementerian Agama	0	0,0
Kementerian Pariwisata	0	0,0
Kementerian Komunikasi dan Informatika	0	0,0
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1	4,2
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	0,0
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	0	0,0
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ (Bapenas)	0	0,0
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (BPN)	0	0,0
Kementerian Badan Usaha Milik Negara	0	0,0
Kementerian Pemuda dan Olahraga	0	0,0
Kejaksaan Agung	0	0,0
Tentara Nasional Indonesia	0	0,0
Kepolisian Negara Republik Indonesia	0	0,0
Sekretaris Kabinet	0	0,0
Arsip Nasional Republik Indonesia	0	0,0
Badan Intelijen Negara	0	0,0
Badan Kepagawaian Negara	0	0,0
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	0	0,0
Badan Koordinasi Pananaman Modal	0	0,0
Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional	0	0,0
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	0	0,0
Badan Narkotika Nasional	0	0,0
Badan Nasional Penanggulangan Bencana	0	0,0
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	0	0,0
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	0	0,0
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	0	0,0
Badan Pengawas Tenaga Nuklir	0	0,0
Badan Pengawasan Obat dan Makanan	1	4,2
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	0	0,0
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	0	0,0
Badan Pertanahan Nasional	0	0,0
Badan Pusat Statistik	0	0,0
Badan SAR Nasional	0	0,0
Badan Standardisasi Nasional	0	0,0
Badan Tenaga Nuklir Nasional	0	0,0
Lembaga Administrasi Negara	0	0,0
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	0	0,0
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	0	0,0

Lembaga Ketahanan Nasional	0	0,0
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	0	0,0
Lembaga Sandi Negara	0	0,0
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	0	0,0

Sumber: hasil kajian analisis media BPPKI DKI Jakarta 2015

Penelitian ini juga menemukan bagaimana nuansa substansi informasi kebutuhan tadi dari segi ragam respon para narasumber. Terkait dengan ini maka temuan menunjukkan bahwa opini yang dikanalisis media terkait ragam informasi kebutuhan dasar tadi, beragam antara yang beropini bahwa pihak-pihak terkait dengan urusan itu masih dinilai tidak bekerja, sudah bekerja maksimal namun belum berhasil dan lain sejenisnya. Akan tetapi dari temuan yang ada memperlihatkan bahwa opini para nara sumber itu lebih banyak yang menilai bahwa *kinerja tentang Kementerian* itu sifatnya sudah “bekerja maksimal, belum berhasil”. Proporsi opini yang demikian jumlahnya mencapai 22 (91,7%). Sementara yang berpendapat “bekerja maksimal, berhasil” baru sebatas 6 (25%) saja. Bahkan ada yang beropini bahwa para pihak terkait itu belum bekerja maksimal dalam kaitannya dengan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan soal informasi kebutuhan-kebutuhan dasar tadi. Proporsi opini yang demikian cukup banyak juga frekuensinya yaitu sebanyak 5 kali (20,8%). (lihat tabel 7).

Tabel 7

Pemberitaan Menurut Opini Nara sumber Tentang Kementerian

Opini	f	%
tidak bekerja	0	0,0
belum bekerja maksimal	5	20,8
bekerja maksimal, belum berhasil	22	91,7
bekerja maksimal, berhasil	6	25,0
lainnya	0	0,0

Terkait dengan opini menyangkut pihak pejabat eksekutif sendiri, temuan penelitian menunjukkan bahwa pihak pejabat eksekutif itu kebanyakan dinilai sudah sangat profesional. Jumlah penilaian yang demikian mencapai sebanyak 20 (83,3%). Sementara yang menilai Kurang professional cukup banyak juga jumlahnya, yaitu sebanyak 13 (54,2%).(lihat tabel 8).

Tabel 8

Pemberitaan Arah Pendapat Nara Sumber Tentang Pejabat Eksekutif

Arah Pendapat	f	%
Tidak profesional	0	0,0
Kurang profesional	13	54,2
Sangat profesional	20	83,3
Lainnya	0	0,0

## 2) Cermin Dukungan Terhadap Program Pemerintah

Menyimak sajian data sebelumnya menyangkut pemediasian informasi kebutuhan dasar, maka secara kuantitas media tampaknya secara relatif cenderung masih mencerminkan kurangnya dukungan terhadap program pemerintah terkait masalah informasi kebutuhan dasar itu. Hal ini setidaknya terlihat dari indikasi di mana dari sebanyak 6 indikator informasi kebutuhan dasar itu, tidak semuanya dicover media dan ada satu yang tidak dicover media, yaitu informasi menyangkut sandang.

Selain itu, meskipun media sudah meng-*cover* informasi kebutuhan dasar itu terkait enam indikator, namun dalam pemberitaannya, materi-materi berita itu cenderung tidak spesifik sifatnya. Hal yang demikian tentunya dapat mempersulit kontrol bagi eksistensi pemberitaan dimaksud. Hal ini terlebih lagi pada pemberitaan yang berhubungan dengan persoalan isu Bidang Kemaritiman.

Hal dimaksud itu juga dapat dilihat dari “Pemberitaan Menurut Asal Kementerian”-nya. Dalam kaitan ini tampak bahwa media cenderung masih belum meng-*cover* seluruh kementerian yang ada terkait masalah informasi kebutuhan dasar dimaksud. Dengan demikian, dalam hal ini media tampaknya menjadi terkesan “belum berupaya” sepenuhnya menjalankan fungsi *surveillance* terkait informasi kebutuhan dasar dimaksud. Ada kesan seolah-olah informasi kebutuhan dasar itu hanya ada di Kementerian Pertanian dan di Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah belaka. Pada hal tidak demikian halnya. Informasi kebutuhan dasar itu tersedia di sejumlah kementerian yang ada.

### Diskusi

Penelitian konten analisis ini pada dasarnya hendak menjawab dua pertanyaan utama penelitian, yaitu Bagaimanakah Pemberitaan Informasi Kebutuhan Dasar Dalam Surat kabar Rakyat Merdeka dan Apakah Pemberitaan Informasi Kebutuhan Dasar itu mencerminkan dukungan terhadap program pemerintah.

Dari hasil analisis terhadap data penelitian mengindikasikan bahwa terkait dengan permasalahan pertama tadi, maka pemberitaan media terkait Informasi Kebutuhan Dasar itu, dari segi Substansi konten cenderung menggambarkan bahwa *covering* media itu cenderung masih relatif rendah. Dari relatif rendahnya pemberitaan dimaksud, maka informasi menyangkut pangan itu ternyata merupakan paling banyak dimuat media. Cukup banyak juga terkait dengan informasi menyangkut Pendidikan dan Produksi\_Kelautan. Sementara jenis informasi dalam kategori yang sama jumlahnya relatif kecil.

Kemudian terkait dengan permasalahan kedua, temuan memperlihatkan bahwa secara kuantitas media tampaknya secara relatif cenderung masih mencerminkan kurangnya dukungan terhadap program pemerintah terkait masalah informasi kebutuhan dasar itu. Hal ini setidaknya terlihat dari indikasi di mana dari sebanyak enam indikator informasi kebutuhan dasar itu, tidak semuanya dicover media dan ada satu yang tidak dicover media tersebut yaitu informasi menyangkut sandang. Selain itu, meskipun media sudah meng-*cover* informasi kebutuhan dasar itu terkait enam indikator, namun dalam pemberitaannya, materi-materi berita itu cenderung tidak spesifik sifatnya. Sementara mengenai informasi bidang kelautan, meskipun masih tampak dalam peliputan media akan tetapi sifatnya masih terlalu umum.

Gambaran masih relatif minimnya pemberitaan mengenai informasi kebutuhan dasar sebelumnya, secara terminologis dalam perspektif *Agenda Setting Theory*, kiranya itu merefleksikan masih rendahnya upaya perilaku *salience issue* yang dilakukan media dalam upaya mereka melakukan fungsi *surveillance*.media. Begitu juga dengan temuan masih minimnya secara rigit terkait pemberitaan informasi kebutuhan dasar sebelumnya. Hal ini juga menjadi indikasi bahwa media masih belum berupaya bertindak agar terwujudnya *prominence issue* dalam pelaksanaan fungsi *surveillance*-nya. Namun demikian, dalam penyajiannya, media tampak melakukan upaya-upaya bersifat valence dalam pemediasiannya itu. Itu terlihat dari variasi halaman yang mereka gunakan dalam pemberitaan informasi kebutuhan dasar tadi, yakni ada yang menjadi Halaman\_Utama\_(Headlines); Halaman\_Depan\_Dalam; Halaman\_Tengah dan halaman –halaman lainnya.

Di sisi lain, fenomena terkait dengan masih rendahnya upaya perilaku *salience issue* yang dilakukan awak media dalam upaya mereka melakukan fungsi *surveillance*.media tadi, maka secara terminologis ini memang dapat dimungkinkan terjadi dalam iklim pers yang demokratis seperti di Indonesia saat ini. Dalam realitanya, pers Indonesia saat ini diantaranya memang secara yuridis didukung oleh undang-undang pers (UU No 40 Tentang Pers) yang relatif mendukung iklim kebebasan bagi pihak pers. Dengan landasan yuridis dimaksud maka pers dengan sendirinya menjadi “suka-suka” dalam operasional peliputannya terhadap lingkungannya. Termasuk tentunya terkait dengan masalah informasi kebutuhan dasar tadi, mereka dapat melakukannya sesuai arah kebijakan redaksi masing-masing.

Selain itu, di tengah iklim demokrasi yang terjadi saat ini, seperti dikatakan oleh Abdullah, pemahaman beragam informasi dilakukan berdasarkan prinsip *polysemi* (keragaman makna) dan bukan *monosemy* (ketunggalan makna) sebagaimana yang terjadi dalam kekuasaan beriklim otoriter seperti yang pernah terjadi di Indonesia di masa kepemimpinan Orba.

Dengan argumentasi dimaksud, maka dalam kaitan fenomena cenderung masih mencerminkan kurangnya dukungan media terhadap program pemerintah terkait masalah informasi kebutuhan dasar sebelumnya, kiranya dominannya faktor *monosemy* yang terjadi kini, besar

kemungkinan itu menjadi penyebab utama bagi minimnya dukungan media terhadap program sosialisasi informasi kebutuhan dasar melalui pemberitaan tadi.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Gambaran masih relatif minimnya pemberitaan mengenai informasi kebutuhan dasar sebelumnya, secara terminologis dalam perspektif *Agenda Setting Theory*, kiranya itu merefleksikan masih rendahnya upaya perilaku *salience issue* yang dilakukan media dalam upaya mereka melakukan fungsi *surveillance*.media. Begitu juga dengan temuan masih minimnya secara rigid terkait pemberitaan informasi kebutuhan dasar sebelumnya. Hal ini juga menjadi indikasi bahwa media masih belum berupaya bertindak agar terwujudnya *prominence issue* dalam pelaksanaan fungsi *surveillance*-nya. Namun demikian, dalam penyajiannya, media tampak melakukan upaya-upaya bersifat valence dalam pemediannya itu. Itu terlihat dari variasi halaman yang mereka gunakan dalam pemberitaan informasi kebutuhan dasar tadi, yakni ada yang menjadi Halaman\_Utama\_(Headlines); Halaman\_Depan\_Dalam; Halaman\_Tengah dan halaman –halaman lainnya.

Di sisi lain, fenomena terkait dengan masih rendahnya upaya perilaku *salience issue* yang dilakukan awak media dalam upaya mereka melakukan fungsi *surveillance*.media tadi, maka secara terminologis ini memang dapat dimungkinkan terjadi dalam iklim pers yang demokratis seperti di Indonesia saat ini. Dalam realitanya, pers Indonesia saat ini diantaranya memang secara yuridis didukung oleh undang-undang pers (UU No 40 Tentang Pers) yang relatif mendukung iklim kebebasan bagi pihak pers. Dengan landasan yuridis dimaksud maka pers dengan sendirinya menjadi “suka-suka” dalam operasional peliputannya terhadap lingkungannya. Termasuk tentunya terkait dengan masalah informasi kebutuhan dasar tadi, mereka dapat melakukannya sesuai arah kebijakan redaksi masing-masing.

Selain itu, di tengah iklim demokrasi yang terjadi saat ini, seperti dikatakan oleh Abdullah, pemahaman beragam informasi dilakukan berdasarkan prinsip *polysemi* (keragaman makna) dan bukan *monosemy* (ketunggalan makna) sebagaimana yang terjadi dalam kekuasaan beriklim otoriter seperti yang pernah terjadi di Indonesia di masa kepemimpinan Orba.

Dengan argumentasi dimaksud, maka dalam kaitan fenomena cenderung masih mencerminkan kurangnya dukungan media terhadap program pemerintah terkait masalah informasi kebutuhan dasar sebelumnya, kiranya dominannya faktor *monosemy* yang terjadi kini, besar kemungkinan itu menjadi penyebab utama bagi minimnya dukungan media terhadap program sosialisasi informasi kebutuhan dasar melalui pemberitaan tadi.

**Ucapan terima kasih :** Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada tim redaksi beserta anggota mitra bestrai yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses penyelesaian karya tulis ilmiah ini.

### Daftar Pustaka

- Infante, Dominic A., Rancer, Andrew S., dan Womack, Deanna F.*, Building Communication Theory, Illinois, Waveland Press Inc., 1990.
- Krippendorff, Klaus, Analisis Isi, Pengantar Teori dan Metodologi, Jakarta, Rajawali Press.
- Littlejohn, Steven W.*, Theories of Human Communication, Belmont, USA : Wadsworth Publishing Company, Seven edition, 1996.
- Lippman, Walter, agenda\_setting*, (<http://www.Unc.Edu/courses/2000fall/jo mc. 245-001/>)
- McCombs, M.E., & Shaw, D.L. The Agenda-Setting Function of Mass Media. *Public Opinion Quarterly*, 36 (Summer), 176-187), 1972.
- Rusadi, Udi*, “Efek Agenda Setting Media Massa, Telaahan Teoritis”, dalam Jurnal Penelitian dan Komunikasi Pembangunan, No. 36, Jakarta, Badan Litbang Penerangan, Departemen Penerangan R.I., 1996.
- Wright, Charles R.*, Sosiologi Komunikasi Massa, Ed. Jalaluddin Rakhmat, Bandung, Remadja Karya, C.V., 1986.
- <http://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.nawa.cita.9.agenda.prioritas.jokowi-jk>

## Kerangka Teori, Tinjauan Literatur, Konsep Teoritik

Bagian Kerangka Teori, Tinjauan Literatur, dan Konsep Teoritik adalah menjadi bagian penting dalam proses penulisan karya tulis ilmiah. Akan tetapi dalam realitanya bagian ini masih sering dijumpai kekeliruan dalam penyajiannya. Salah satu bentuk kekeliruan yang paling sering dijumpai dalam praktiknya yaitu bahwa “Tinjauan Literatur” sebagai bagian dari “Kerangka Teori” tadi, isinya mengandung bahasan tentang “Konsep Teoritik”.

Sesuai dengan pengertiannya bahwa *The state of the art is the highest level of development, as of a device, technique, or scientific field, achieved at a particular time. It also applies to the level of development (as of a device, procedure, process, technique, or science) reached at any particular time usually as a result of modern methods.* (<http://www3.hi.is/~joner/eaps/soa1.htm>), maka *The state of the art* itu pada intinya sebenarnya bermakna keadaan terkini terkait apa yang sedang “kita” kaji/telaah/teliti. Dalam hubungannya dengan penelitian kita misalnya, maka *The state of the art* sebagai temuan kita melalui aktifitas Tinjauan Literatur-Literatur Review tadi, fungsinya dapat menjadi kontrol terhadap penelitian kita itu sendiri. Hal-hal yang dikontrol itu terutama misalnya terkait dengan masalah penelitian; variabel/konsep; dan metode. Dengan demikian diharapkan terutama tidak terjadi pengulangan penelitian yang sama, misalnya terkait dengan persoalan penelitian yang sama.

Dalam praktik, persoalan “Tinjauan Literatur” ini sistematika penyajiannya adalah :

KERANGKA TEORI ;

1. Tinjauan Literatur-*Literatur Review*
2. Konsep-Konsep Teoritik
3. Definisi Konsep
4. Definisi Operasional

Dengan sistematika dimaksud, maka Tinjauan Literatur-*Literatur Review* menjadi bagian pertama yang harus dipaparkan dalam bagian KERANGKA TEORI. Dalam pemaparannya, lazimnya dilakukan melalui dua format, yaitu format tabel-matrik atau format naratif. Baik format naratif maupun format matrik, isinya biasanya terkait dengan : Nama Peneliti; Thn Penelitian; Type aktifitas ; Metode; Variabel/aktifitas; dan Temuan Penelitian. (Disajikan oleh Hasyim Ali Imran).